

Volume 11 Nomor 2 Agustus 2026
E-ISSN 2541-0938 P-ISSN 2657-1528

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI JURKAMI

JURKAMI

VOLUME 11
NOMOR 2

SINTANG
AGUSTUS
2026

DOI
10.31932

E-ISSN
2541-0938
P-ISSN
2657-1528

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK), JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Dhiya Marzuq Falah Ramadhan¹, Sodik Dwi Purnomo^{2✉}, Zumaeroh³
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia
1,2,3

✉Corresponding Author Email: sodikdwipurnomo@yahoo.com²
Author Email : spedramadhan@gmail.com¹, zumaeroh1234@gmail.com³

Article History:

Received: April 2026

Revision: May 2026

Accepted: May 2026

Published: August 2026

Keywords:

Income Inequality; ICT

Development;

Population;

Unemployment.

Abstract:

Income inequality remains one of the foremost challenges in Indonesia's economic development, reflecting the uneven distribution of welfare across regions. This study examines the effects of the Information and Communication Technology Development Index (ICT-DI), population size, and unemployment rate on income inequality across Indonesia over the 2019–2023 period. Employing a quantitative approach, the study draws on secondary data from Statistics Indonesia (BPS) covering 34 provinces. The findings indicate that the ICT Development Index exerts a negative and statistically significant effect on income inequality, suggesting that advances in digital technology access and utilization foster a more equitable distribution of income. Population size, by contrast, demonstrates a positive yet statistically insignificant effect, implying that sheer demographic magnitude does not independently determine inequality in the absence of supportive structural conditions. The unemployment rate, meanwhile, shows a positive and significant effect, underscoring that rising unemployment tends to widen the income gap between employed and unemployed segments of the population. Accordingly, inclusive ICT development alongside robust employment creation policies should be prioritized as key instruments in reducing income inequality in Indonesia. This study is subject to several limitations, namely its reliance on three independent variables, a comparatively narrow observation window (2019–2023), and secondary data sourced exclusively from BPS, which may not fully capture the qualitative dimensions that shape income inequality.

Abstrak:

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang mencerminkan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IP-TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga besaran populasi belum menjadi faktor penentu utama ketimpangan pendapatan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan TIK yang inklusif serta kebijakan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mencakup tiga variabel independen dengan periode

Sejarah Artikel:

Diterima: April 2026

Direvisi: Mei 2026

Disetujui: Mei 2026

Diterbitkan: Agustus 2026

Kata kunci:

Ketimpangan

Pendapatan; IP-TIK;

Jumlah Penduduk;

Tingkat Pengangguran.

pengamatan yang relatif singkat (2019–2023) serta mengandalkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik yang belum mampu menangkap faktor-faktor kualitatif yang turut memengaruhi ketimpangan pendapatan.



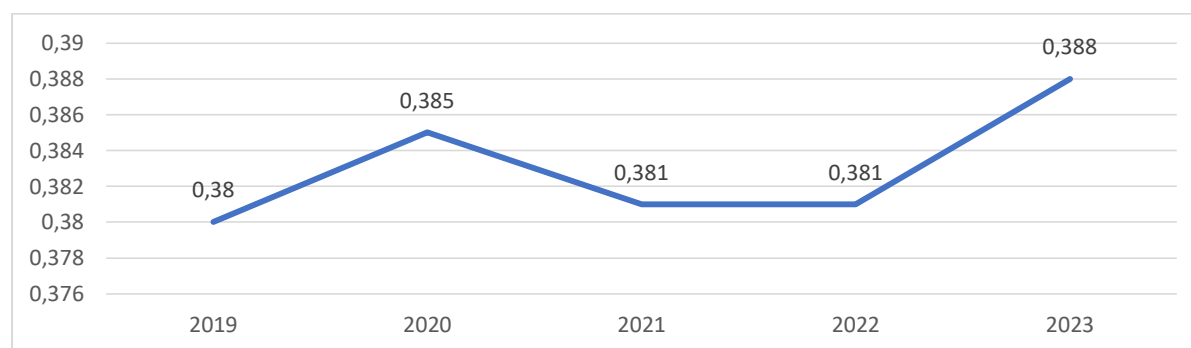
How to Cite: Dhiya Marzuq Falah Ramadhan, Sodik Dwi Purnomo, Zumaeroh. 2026. PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK), JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 11 (2), DOI: <https://doi.org/10.31932/jpe.v11i2.6382>

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang mencerminkan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan antarwilayah dan kelompok masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan perbedaan tingkat penghasilan, tetapi juga mencerminkan disparitas dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2006). Baldwin dalam Sugiastuti dan Pratama (2022) menegaskan bahwa distribusi pendapatan yang timpang menciptakan jurang kemakmuran, di mana sebagian masyarakat menikmati kelimpahan sementara kelompok lainnya hidup dalam

keterbatasan. Fenomena tersebut menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Indrawati, 2021; Tambunan, 2001).

Ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan rasio gini, yaitu indikator yang menunjukkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah dengan skala antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai rasio gini, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi (Lutfiani & Yunasih, 2020). Adapun data rasio gini di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.

Nilai Rasio gini Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Data Badan Pusat Statistik pada Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai rasio gini Indonesia selama periode 2019–2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019,

nilai rasio gini tercatat sebesar 0,380 dan meningkat menjadi 0,385 pada tahun 2020. Selanjutnya, nilai tersebut menurun menjadi 0,381 pada tahun 2021 dan relatif



stabil pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 0,388 pada tahun 2023. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas kondisi sosial ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) digunakan untuk mengukur tingkat akses, penggunaan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Peningkatan akses TIK berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru dan peningkatan produktivitas, sehingga dapat menekan ketimpangan pendapatan. Namun, ketidakmerataan adopsi teknologi antarprovinsi di Indonesia berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi (Muharrar dan Wulandari, 2025). Penelitian Jahidah et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti semakin tinggi pemanfaatan teknologi, semakin kecil tingkat ketimpangan. Temuan ini sejalan dengan Wijayanti et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa TIK berperan penting dalam mengurangi disparitas distribusi pendapatan antarwilayah di Indonesia.

Selain perkembangan teknologi, jumlah penduduk juga menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah dan struktur populasi yang dipengaruhi oleh kelahiran,

kematian, dan migrasi (Hambarsari & Inggit, 2016). Populasi yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tanpa dukungan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Wahyuni dan Andriyani (2022) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Firdaus dan Hasmarini (2023), yang menyatakan bahwa tingginya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai dapat memperlebar jurang pendapatan antar kelompok masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat pengangguran. Pengangguran mencerminkan ketidakmampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan risiko kemiskinan dan ketimpangan sosial (Samosir & Silalahi, 2026). Dengan demikian, peningkatan tingkat pengangguran cenderung memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan dan yang tidak.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji determinan ketimpangan pendapatan, sebagian besar studi masih berfokus pada variabel ekonomi tertentu atau menggunakan periode pengamatan yang terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan pengaruh IP-TIK, jumlah penduduk, dan tingkat



pengangguran secara simultan dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia pada periode terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan pendekatan regresi data panel pada 34 provinsi selama periode 2019–2023.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur ekonomi pembangunan serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*, yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023 sehingga menghasilkan 170 unit observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumentasi terhadap laporan statistik serta penelitian kepustakaan untuk mendukung landasan teoritis.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini (Al Aqilah, *et al.* 2024). Variabel independen terdiri atas Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang menggambarkan tingkat pembangunan dan pemanfaatan teknologi digital, jumlah penduduk yang menunjukkan total populasi di setiap provinsi, serta tingkat pengangguran yang diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Seluruh variabel diukur berdasarkan data tahunan pada masing-masing provinsi selama periode penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Untuk memperoleh model estimasi yang paling tepat, dilakukan pemilihan model melalui beberapa pengujian, yaitu uji Chow untuk menentukan pilihan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), uji Hausman untuk memilih antara FEM dan *Random Effect Model* (REM), serta uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan pilihan antara CEM dan REM. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan validitas dan reliabilitas model estimasi. Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1(X_1)_{it} + \beta_2(X_2)_{it} + \beta_3(X_3)_{it} + e_{it}$$

Dimana Y merupakan ketimpangan pendapatan, β_0 adalah konstanta, β_1 , β_2 , β_3 adalah koefisien regresi, X_1 adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (IP-TIK), X2 adalah jumlah penduduk, X3 adalah tingkat pengangguran, i adalah *cross section*, t adalah *time series*, dan e_{it} adalah *error term*.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan, serta uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi

Tabel 1. Regresi Data Panel (Model Fixed Effect)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0,342376	8,057600	0,0000
X1	-0,008097	-6,673829	0,0000
LnX2	0,004972	1,009242	0,3147
X3	0,001298	2,006376	0,0468
Adjusted R-squared	0,978904		
F-statistic	218,8384		
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Diolah dengan Eviews 9

Persamaan regresi data panel yang dihasilkan melalui pendekatan *fixed effect model* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0,342376 - 0,008097X_{1it} + 0,004972\text{Ln}X_{2it} + 0,001298X_{3it} \quad (1)$$

Hasil estimasi regresi dengan menggunakan FEM menunjukkan bahwa variabel IP-TIK memiliki koefisien sebesar $-0,008097$ dengan nilai probabilitas 0,0000, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan

Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2019–2023 dengan menggunakan pendekatan regresi data panel pada 34 provinsi. Pemilihan model estimasi dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model*. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0159 ($< 0,05$), sehingga menegaskan bahwa FEM merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

teknologi informasi dan komunikasi mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Secara konseptual, IP-TIK mencerminkan tingkat akses, penggunaan, dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Peningkatan pada dimensi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi, pasar, serta layanan ekonomi secara lebih luas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja. Dalam

perspektif ekonomi pembangunan, pemanfaatan TIK mampu menurunkan hambatan struktural dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa teknologi digital berfungsi sebagai equalizer ekonomi yang memungkinkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengakses peluang yang sebelumnya hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas (Shah & Krishnan, 2024). Hasil ini sejalan dengan penelitian Wijayanti et al. (2023) serta Azzahra dan Nasution (2024) yang menemukan bahwa pemerataan akses dan literasi digital berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Lebih lanjut, penelitian lintas negara yang dilakukan oleh Usmanova et al. (2023) menggunakan analisis regresi kuantil panel terhadap 83 negara periode 2002–2019 menemukan bahwa kemajuan TIK secara konsisten berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dan efek ini semakin kuat pada negara-negara dengan koefisien Gini yang lebih tinggi. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, yang masih mencatat rasio gini di atas rata-rata, justru memiliki potensi manfaat yang lebih besar dari investasi di sektor TIK. Dengan demikian, pembangunan TIK yang inklusif dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia.

Variabel jumlah penduduk yang diestimasi dalam bentuk logaritma natural ($\ln X_2$) menunjukkan koefisien sebesar 0,004972 dengan arah hubungan positif, namun tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas sebesar

0,3147 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah penduduk belum mampu menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan secara langsung selama periode penelitian. Secara teoretis, jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja dan tingkat konsumsi. Namun, pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, serta kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja. Studi yang dilakukan oleh Tchamyou et al. (2022) terhadap negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa besaran populasi semata tidak cukup untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan apabila tidak disertai dengan investasi pada modal manusia dan pemerataan akses terhadap teknologi. Lebih jauh, interaksi antara TIK dan kualitas sumber daya manusia justru menjadi penentu yang lebih kuat dalam mereduksi ketimpangan dibandingkan faktor demografis itu sendiri (Tchamyou et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Julihanza dan Khoirudin (2023) serta Primadianti dan Sugiyanto (2020) yang menyatakan bahwa besaran populasi tidak selalu menjadi determinan utama ketimpangan pendapatan apabila tidak disertai dengan disparitas kualitas ekonomi dan kesempatan kerja antarwilayah. Dengan kata lain, kebijakan kependudukan yang berfokus pada pengendalian kuantitas semata akan kurang efektif tanpa diiringi dengan program peningkatan keterampilan, akses pendidikan, dan perluasan lapangan kerja yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengendalian ketimpangan pendapatan tidak cukup hanya berfokus pada aspek

demografis, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Sementara itu, variabel tingkat pengangguran menunjukkan koefisien sebesar 0,001298 dengan nilai probabilitas 0,0468 ($< 0,05$), yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran cenderung memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan dan yang tidak. Secara teoretis, pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama bagi individu, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan memperlebar jurang kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, ketidakmerataan kesempatan kerja antarwilayah serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak memperkuat dampak pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Argumen ini diperkuat oleh laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang menegaskan bahwa kesenjangan antara angkatan kerja yang bekerja dan yang tidak bekerja merupakan salah satu pendorong utama pelebaran ketimpangan distribusi pendapatan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (ILO, 2024). Selain itu, penelitian Azam & Bhatt (2023) menggunakan data panel negara berkembang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya menekan pendapatan kelompok bawah, tetapi juga menciptakan efek spiral negatif di mana kemiskinan yang meluas semakin mempersulit individu untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan yang

dibutuhkan untuk keluar dari lingkaran ketimpangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Jibril et al. (2025) dan Rohmah et al. (2025) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang kurang beragam. Oleh karena itu, upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari agenda perluasan kesempatan kerja yang produktif, terutama melalui pengembangan sektor-sektor padat karya dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.

Secara simultan, ketiga variabel independen dalam model penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sebagaimana tercermin dari nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000. Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,978904 menunjukkan bahwa sekitar 97,89% variasi ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel IP-TIK, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 2,11% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Tingginya nilai koefisien determinasi ini menegaskan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Tingginya nilai ini sejalan dengan karakteristik model data panel dengan pendekatan *fixed effect*, di mana efek individu antarprovinsi mampu ditangkap secara lebih presisi sehingga menghasilkan daya prediksi yang lebih tinggi dibandingkan model pooled OLS (Baltagi, 2021).



Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan pengaruh pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, faktor demografis, serta kondisi pasar tenaga kerja dalam satu kerangka analisis menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia pada periode terbaru, yaitu 2019–2023. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan TIK yang inklusif dan kebijakan penciptaan lapangan kerja merupakan strategi penting dalam menekan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ekonomi pembangunan, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, kondisi demografis, serta dinamika pasar tenaga kerja memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2019–2023. Peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terbukti mampu menurunkan ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil antarwilayah. Sementara itu, jumlah penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga besaran populasi semata belum dapat menjelaskan variasi kesenjangan ekonomi tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan struktur ekonomi yang

inklusif. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbukti memperlebar ketimpangan pendapatan karena keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pembangunan TIK yang inklusif melalui pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan literasi serta keterampilan digital masyarakat, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan variabel independen hanya terbatas pada tiga variabel, yaitu IP-TIK, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran, sehingga faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah belum turut dipertimbangkan dalam model. Kedua, periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu 2019–2023, membatasi kemampuan model dalam menangkap dinamika jangka panjang dari ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketiga, penggunaan data sekunder dari Badan Pusat Statistik menjadikan analisis ini belum mampu menangkap dimensi kualitatif, seperti persepsi masyarakat terhadap akses teknologi dan kondisi ketenagakerjaan di lapangan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel independen dengan memasukkan faktor-faktor struktural lainnya, seperti indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan,

dan desentralisasi fiskal, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan pendapatan. Selain itu, periode penelitian dapat diperpanjang agar tren jangka panjang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan data kuantitatif dengan data kualitatif juga dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih kaya dalam memahami dinamika ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aqilah, M. R., Muchtar, M., & Robinson Sihombing, P. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 13-24.
- Azzahra, N. A., & Nasution, M. I. P. (2024). Dampak Perbedaan Akses Teknologi Terhadap Kesenjangan Sosial Ekonomi (The Impact of Differences in Technology Access on Socio-Economic Inequalities). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 422-429. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3491>
- Baldwin, R. E. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Berkembang* (2nd ed.). Jakarta: Bina Aksara.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 116-123.
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(02).
- ILO. (2024). *World Employment and Social Outlook: Trends 2024*. International Labour Organization.
- Indrawati, L. R. (2021). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 95-104.
- Jahidah, J., Nurmaniah, N., & Muharman, T. (2025). Teknologi informasi dan komunikasi: Solusi untuk ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(1), 45-58.
- Jibril, H. T., Tajibu, M. J., & Karim, K. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pekerja Informal Non-Pertanian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1467-1474.
- Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1-12.
- Lutfiani, D., & Yuniasih, A. F. (2020). Pengaruh Disparitas Capaian Pendidikan Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2019. In *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 662-671.



- Muharrar, A. R., & Wulandari, D. L. (2025). Transformasi Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Wilayah Perkotaan Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 47-56.
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.1-20>
- Rohmah, W, R, M, S., Alwi, M, D, R., & Vidiyanto, M, (2025), Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita, terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) di 12 Provinsi pada Tahun 2019-2023, *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, 6(01), 1-15. <https://doi.org/10.21274/jeps.v6i01.11033>
- Samosir, Y. R., & Silalahi, R. (2026). Masalah Ketimpangan Pendapatan dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 77-91.
- Shah, C. S., & Krishnan, S. (2024). ICT, Gender Inequality, and Income Inequality: A Panel Data Analysis Across Countries. *Information Systems Frontiers*, 26(3), 709–727. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10396-4>
- Sugiasuti. R. H.. & Pratama. M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*. 16(1). 79-90.
- Tambunan. T H. 2001. Transformasi Ekonomi Indonesia (Teori Dan Penemuan Empiris). Jakarta: Salemba Empat
- Tchamyu, V. S., Erreygers, G., & Cassimon, D. (2022). Inequality, ICT and Financial Access in Africa. *Technological Forecasting and Social Change*, 139, 169–184. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.11.004>
- Todaro, M, P., & Smith, S, C, (2006), Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan), Jakarta: Penerbit Erlangga
- Usmanova, A., et al. (2023). The impact of ICT and export diversification on income inequality: Panel quantile regression analysis. In *Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems* (pp. 462–470). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_30
- Wahyuni. S.. & Andriyani. D. (2022). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018–2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 12(1): 25–39.
- Wijayanti. F. D.. Rahmawati. N.. & Prasetyo. E. (2023). Analisis pengaruh IP-TIK terhadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 14(3). 211–222.
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan

Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 245-265.

<https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.62>

8

